



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 925/III/IX/2016

**Sekolah Vokasi Diharapkan  
Kurangi Tingkat Pengangguran**

**Ibadah Qurban Merupakan  
Bentuk Ketauhidan**

**BPOM Perlu Kerjasama dengan  
Kominfo Terkait  
Maraknya Makanan Kadaluarsa**



# Sekolah Vokasi Diharapkan Kurangi Tingkat Pengangguran

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, sekolah-sekolah vokasi diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menyiapkan lulusannya sebagai tenaga kerja terampil. Hal ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla adalah memprioritaskan pengembangan pendidikan vokasi.

“ Sekolah-sekolah vokasi diberdayakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memaksimalkan kompetensi anak-anak bangsa,” kata Sutan, usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/9).

Oleh karena itu, tambah Sutan, kebutuhan tenaga terampil siap pakai

yang bisa bersaing dalam era pasar bebas regional ASEAN atau MEA, bahkan tingkat dunia sangat tergantung dari keseriusan mengembangkan SMK pada saat ini.

“Kalau kita lihat postur anggaran pendidikan Malaysia dan Thailand dalam 3 atau 4 tahun belakangan memperlihatkan porsi yang besar untuk sekolah berbasis keterampilan seperti SMK di Indonesia,” jelas Sutan.

Menurut politisi F-Gerindra itu, hal itu menunjukkan kedua negara itu mempersiapkan diri untuk tampil sebagai pemenang dalam MEA. Bahkan di Thailand, dipadukan dengan program satu desa satu produknya, jadi ada sinergi antara industri desa dan sekolah kejuruan.

“Maka tak heran untuk beberapa bidang industri Thailand merajai dunia dengan tenaga terampilnya, seperti industri kemasan buah olahan, negara Eropa dan Amerika pun memakai SDM mereka sebagai tenaga ahli,” imbuh Sutan.

Dalam kesempatan itu, Komisi X juga menyalurkan dana bantuan kepada 700 SMK di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan dana Rp364 miliar untuk peningkatan pendidikan vokasi atau SMK di Jatim. Anggaran yang difokuskan untuk sarana dan prasarana di SMK itu bertujuan mendorong penguatan vokasi di Indonesia.

Sutan menjelaskan, tidak secara menyeluruh SMK di Jawa Timur yang bisa mendapatkan dana desentralisasi tersebut. Menurutnya banyak indikator terkait pemberian anggaran



*Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau sejumlah Sekolah di Surabaya*

terhadap SMK tersebut, diantaranya, jumlah siswa, guru, jumlah jurusan dan lokasi sekolah.

“Sebelumnya kami sudah melakukan verifikasi sekolah-sekolah mana yang akan mendapatkan dana ini. Khusus untuk SMKN 1 Surabaya kami alokasikan dan anggaran pendidikan Rp1,6 miliar. Kami berharap dengan dana tersebut SMKN 1 Surabaya menjadi

lebih memberikan manfaat bagi siswa sekaligus bagi masyarakat,” harap politisi asal dapil Jambi itu.

Menanggapi bantuan itu, Kepala SMKN 1 Surabaya, Bahrin mengaku akan menggunakan dana tersebut untuk membangun RKB dan membeli peralatan untuk siswa. Rencananya penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) berjumlah enam ruang. Sebab, jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolahnya sebanyak 80, sedangkan ruang kelas baru 65.

Ia juga mengaku bahwa bantuan ini merupakan tahun kedua sekolahnya mendapatkan anggaran. Pada tahun lalu, pihaknya mendapatkan bantuan sebesar Rp900 juta, sedangkan tahun ini sebesar Rp1,6 miliar. Peningkatan anggaran itu, lanjut Bahrin, diyakini karena pihaknya selalu memperbaharui data pokok pendidik (dapodik) dan sistem pembelajaran di sekolahnya.

“Jumlah siswa kami mencapai 1500-an. Tiap tahun kami selalu meluluskan 500 siswa dan 60 persen langsung bekerja di bidangnya,” jelas Bahrin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi Dindik Jatim Hudyono mengapresiasi langkah Komisi X DPR RI dan Kemendikbud yang turut membantu pengembangan pendidikan vokasi di Jatim. Hudyono menambahkan, saat ini di Jatim terdapat 1.886 SMK, namun baru 30 persen sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana.

“Dana dekonsentrasi itu bisa digunakan untuk membangun ruang kelas baru atau menambah peralatan praktik,” katanya. ■

## Ketua DPR RI Minta Pemerintah Perbaiki Fasilitas Jemaah Haji Reguler

Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta Pemerintah memperbaiki fasilitas Jemaah haji reguler. Tenda jemaah haji reguler dinilai kurang layak dan jarak maktab jemaah juga terlalu jauh. Inilah salah satu yang dipantau Akom saat meninjau pelaksanaan haji di Arab Saudi.

“ Jarak maktab jemaah reguler terlalu jauh, lebih dari 10 km untuk pulang pergi, juga tanpa persediaan air minum yang cukup,” kata Akom saat berada di Mina, Selasa malam (13/9). Kesehatan Jemaah haji Indonesia juga perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Apalagi, rasio dokter yang ada tidak memadai untuk menangani seluruh jemaah yang terganggu kesehatannya.



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama sejumlah Anggota DPR RI melakukan pengawasan pelaksanaan haji di Arab Saudi

Akom berada di Arab Saudi bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan haji tahun ini. Pertemuan juga secara intens dilakukan dengan seluruh anggota tim pengawas haji. Namun, secara umum Akom menilai, pelaksanaan haji tahun 2016 ini ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Catatan penting lainnya dari pelaksanaan haji adalah perlu sinergitas antara Kementerian Agama,

Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan instansi terkait lainnya untuk bekerja bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. "Yang terpenting lagi, perlu adanya peningkatan peran diplomatis kita dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," harap Akom.

Pada bagian lain, Akom juga mengapresiasi usaha Presiden Joko Widodo untuk meminta tambahan kuota haji kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan

memanfaatkan kuota tak terpakai dari negara tetangga untuk diberikan kepada Indonesia. Ini suatu terobosan yang tepat untuk keluar dari dilema daftar tunggu calon haji yang sangat panjang di Indonesia.

"Saya mengapresiasi usaha Presiden Jokowi yang telah berhasil memperjuangkan penambahan kuota haji Indonesia di tahun berikutnya. Ini patut dihargai," puji Akom. ■

(mb), Foto: dok/jk



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL** **KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Ariaindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]

## Fahri Hamzah: Inpres No.8/2016 Keliru

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai langkah Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2016 telah keliru. Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga seharusnya dilakukan melalui revisi Undang-Undang (UU) APBN.

“ Dalam hal pembuatan UU, setelah amandemen, posisi DPR RI lebih tinggi, sehingga setiap rupiah harus diregulasi dan mendapatkan persetujuan dewan. Tidak boleh dipotong sembarangan,” tegas Fahri dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Inpres penghematan Jokowi Melanggar UU Di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Menurutnya, pemangkasan anggaran seharusnya mutlak menjadi persetujuan antara DPR RI dan Pemerintah, karena APBN disahkan berdasarkan UU. Begitupun, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak terpisahkan dari APBN.

“Inpres itu imbauan. Kalau mengimbau jangan ditentukan jumlahnya dari sekarang. Itu adalah pos yang tidak boleh dipotong sembarangan. DAU itu enggak boleh dipotong dari pusat, sebab rumusnya masuk ke dalam



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam acara dialektika demokrasi

UU No. 32 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Enggak boleh sembarangan dipotong pakai Inpres. Harus pakai UU atau instrumen setingkat UU,” tandasnya.

Di sinilah, sambung Fahri, kekeliruan Presiden dalam memotong anggaran yang sudah disahkan oleh UU. Jika kesalahan pemerintah seperti ini dibiarkan, maka restu DPR RI tak diperlukan lagi, kecuali terkait hal-hal yang bersifat formal.

“Padahal, jelas disebutkan dalam UU bahwa posisi DPR RI lebih tinggi daripada pemerintah, makanya disebut kuasa pembuat UU,” imbuh politisi dari dapil NTB itu.

Hal senada disampaikan, Pakar Hukum Tata Negara Rahmat Bagdja. Inpres yang dikeluarkan Presiden cacat hukum. Sesuai dengan Pasal 37 UU APBN bahwa berapapun uang yang dikeluarkan negara harus dilaporkan ke DPR RI.

“Pemerintah secara sadar telah melampaui kewenangannya dalam membuat aturan, apalagi dalam membuat anggaran. Pemerintah sudah beberapa kali telah *offside* dalam melakukan kewenangannya, sehingga bisa masuk pada jebakan melanggar undang-undang. Kalau ingin melampaui kewenangan, maka UU APBN itu dilakukan melalui Perppu,” ujar Rahmat. ■

(amr)/fotosyuhada/ica

## Sambut 'Visit ASEAN @50' dengan Jaminan Keamanan

Setelah peresmian serta peluncuran kampanye pariwisata 'Visit ASEAN @50' dalam rangka memperingati 50 Tahun ASEAN pada 2017 nanti. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyarankan kepada Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar menyiapkan sejumlah langkah strategis, supaya mendapat manfaat positif dari agenda ini.

Dia menyarankan salah satu langkah strategis dalam menyambut usia emas ASEAN, adalah pemerintah agar memberikan perhatian khusus di sektor keamanan negara. Karena dengan keamanan negara yang terjamin tentu akan membuat nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

"Peringatan 50 tahun emas ASEAN

lewat agenda 'Visit ASEAN @50' perlu kita songsong, memberikan yang terbaik dalam layanan pariwisata dan hasilnya bisa menguatkan ekonomi kita. Salah satu yang perlu jadi perhatian adalah memperkuat keamanan sehingga menambah rasa aman bagi wisatawan yang datang," ujar Agus di sela-sela acara pembukaan KTT ASEAN 6-8 September di Vientiane,

Laos, dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Selasa (13/9/2016).

Baginya Indonesia dan ASEAN sangat melimpah dengan potensi kekayaan budaya yang sebagian di antaranya telah diakui oleh UNESCO. Agus menjelaskan, sejumlah negara ASEAN dapat saling bekerjasama untuk mempromosikan paket wisata terpadu dalam satu kunjungan.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menghadiri pembukaan KTT ASEAN

Sementara itu dalam pertemuan *Interface* antara organisasi parlemen ASEAN (AIPA) dengan kepala negara atau pemerintahan usai upacara pembukaan

menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Agus mengaku puas karena pembicaraan antara legislatif dan eksekutif di kawasan ASEAN berlangsung baik.

KTT, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang ini menyebut sejumlah isu pariwisata dan budaya juga menjadi perhatian.

Masalah lain seperti kemajuan ekonomi, keamanan, pekerja migran dan sengketa wilayah yang dirangkum dalam AIPA *Message* juga

"Pertemuan *Interface* secara umum berlangsung baik, kami dari AIPA, seluruh pimpinan parlemen se-ASEAN dan pimpinan negara ASEAN sangat puas. Pertemuan *Interface* sangat menentukan dan juga sangat memberikan solusi bagi kesejahteraan di kawasan ASEAN," ungkapnya.

Dalam forum *Interface* tersebut sejumlah kepala negara termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo meminta agar dialog antara perwakilan parlemen (AIPA) dengan kepala negara atau pemerintahan (ASEAN) dapat dilangsungkan secara berkala. Komunikasi yang baik diharapkan dapat mempercepat pencapaian ASEAN *Community* yang ditargetkan tahun 2025. ■

(foto) | Foto: dek/br

## Ibadah Qurban Merupakan Bentuk Ketauhidan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menghadiri acara penyembelihan hewan Qurban tahun 1437 H yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diselenggarakan oleh KORPRI SETJEN DPR RI bekerjasama dengan pengurus Masjid Baiturrahman MPR/DPR/DPD RI.

“Ibadah Qurban ini bersifat simbolis, dan merupakan wujud dari kepesertaan kita dengan kegiatan haji di tanah suci. Ini adalah perayaan tauhid, kita akan diuji secara terus menerus apakah kita mementingkan hawa nafsu diri sendiri atau mementingkan Allah SWT,” ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).

Ia juga mengatakan, salah satu fungsi masjid adalah sebagai pusat kegiatan masyarakat. Melalui ibadah Qurban ini bisa menjadi pemantik untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, supaya agama menjadi lebih mengakar pada kehidupan manusia.

"Saya mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan dan soliditas dari para pegawai dan pimpinan di lingkungan Setjen DPR RI," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany juga menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena masih dapat berkumpul dan diberikan nikmat sehat untuk



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Sekjen DPR RI dalam acara penyembelihan hewan Qurban tahun 1437 H

melaksanakan ibadah, khususnya ibadah Qurban.

"Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan semangat untuk terus melaksanakan ibadah, salah satunya adalah ibadah Qurban yang telah di contohkan oleh Nabi Ibrahim as," ucap Win, sapaan akrabnya.

Menurutnya, banyak kegiatan lain yang juga dilakukan oleh pengurus masjid Baiturrahman MPR/DPR/DPD RI yang menjadi kegiatan rutin. Diantaranya adalah turut memfasilitasi para mualaf, pengajian rutin, serta memfasilitasi acara pernikahan. Mengam sifatnya masih sebatas internal,

dan belum banyak untuk kegiatan ke luar.

"Tujuan kita memperingati ibadah Qurban ini adalah agar kita bisa introspeksi diri tentang keikhlasan dalam melaksanakan ibadah dengan berserah diri kepada Allah SWT, serta mampu mencontoh perilaku teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang begitu sabar dalam menjalani ujian hingga diangkat derajatnya," ucapnya.

Pada tahun ini ada empat ekor sapi yang disembelih, dan merupakan hewan Qurban dari Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR RI bidang KOREKKU Taufik Kurniawan, KORPRI, dan satu ekor lagi dari Fraksi Golkar.

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Setjen DPR RI Mardian Umar disela-sela acara penyembelihan hewan Qurban mengatakan pemotongan hewan Qurban sengaja dilakukan pada hari kerja, karena sesuai rencananya daging hewan Qurban tersebut akan dibagikan kepada para mustahiqnya yakni para pegawai kebersihan, anggota PAMDAL, dan juga karyawan di lingkungan Setjen yang berhak mendapatkan. ■

(foto) | Foto: Jayadi/br

# Demokrasi Indonesia Menghadapi Tantangan Agenda Kesejahteraan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan banyak pihak yang melihat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam konteks yang lebih luas, kombinasi Islam dan demokrasi dapat tumbuh harmonis.

“ Dalam konteks yang lebih spesifik, Indonesia bahkan banyak dijadikan rujukan sebagai negara dimana demokrasi dan Islam dapat tumbuh secara harmonis,” ujar Fadli dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Kamis (15/9) menanggapi Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap 15 September.

Dalam perkembangannya, Fadli melihat perkembangan demokrasi di Indonesia meskipun banyak tantangan namun telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi dengan mampu menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara langsung.

"Sejak 1998, walaupun memiliki banyak tantangan, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Indonesia telah menerapkan pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan di 269 daerah secara tertib dan aman," tuturnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan, jika dilihat lebih dalam demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedural serta masih memiliki tantangan. "Namun jika dilihat lebih dalam, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih sebatas prosedural. Belum substansial, dan masih dihadapkan pada tantangan agenda



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

kesejahteraan yang besar,"ujarnya. "Ini tergambar dari masih tingginya kesenjangan di tengah masyarakat Indonesia. Koefisien Gini Indonesia saat ini 0.41. Sehingga meski pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya," jelas Fadli.

"Sekitar 80 persen penduduk rawan merasa tertinggal. Tidak ada pemerataan pembangunan yang pada akhirnya memunculkan kesenjangan," sambungnya.

Fadli juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal sebagaimana diterapkan di negara barat, namun Indonesia menerapkan demokrasi pancasila. Fadli pun juga menambahkan bahwa saat ini yang berkembang hanyalah demokrasi politik.

"Demokrasi kita adalah

demokrasi Pancasila. Yang mencakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Problemnya, yang saat ini berkembang hanyalah demokrasi politik. Sehingga demokrasi yang kita jalani belum diiringi pembangunan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial," jelasnya.

Fadli menegaskan bahwa demokrasi tetap harus dibangun dengan memperhatikan

konteks, budaya dan sejarahnya. "Demokrasi di setiap negara harus dibangun dengan memperhatikan konteks, berdasarkan budaya dan sejarahnya. *Democracy is not one size-fit all solution*," tambah Fadli.

Dalam konteks global, Fadli menambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 193 negara anggota PBB yang mengadopsi 2030 *Agenda for Sustainable Development*, yakni sebuah komitmen global untuk menghadirkan kesejahteraan secara lebih cepat bagi warga negaranya

"Adanya komitmen ini sangat penting, dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi agenda kesejahteraan yang sudah ditetapkan," tutup Fadli. ■

(hs), foto: Hindra.com

## Semen Padang Hospital Beri Layanan Terbaik

Semen Padang Hospital (SPH) dinilai oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI telah memberi layanan terbaik kepada para pasiennya. SPH juga memberi layanan dan fasilitas terbaik untuk pasien VVIP untuk anggota dewan.

Demikian terungkap saat BURT DPR RI meninjau SPH, baru-baru ini, di Kota Padang, Sumatera Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat dari dekat kerja sama PT. Jasindo, penyedia jasa asuransi kesehatan untuk para anggota DPR RI dengan SPH. Yang juga dinilai baik dari SPH adalah desain lingkungan rumah sakit yang seperti mall.

Desain seperti ini kata Wakil Ketua BURT Elva Hartati sangat membantu pasien secara psikologis untuk cepat sembuh. Pasien juga tak merasa takut saat berhadapan dengan tenaga medis dan perawat setempat, karena mereka tak mengenakan busana serba putih seperti di



Wakil Ketua BURT Elva Hartati berdialog dengan pasien Semen Padang Hospital

rumah sakit.

SPH juga menerima dengan baik pasien JKN BPJS. Di sini banyak pasien terlayani dengan baik. Namun, belum

banyak anggota dewan yang berobat ke SPH ini. Loket khusus anggota dewan juga belum ada. Padahal, mereka mendapat layanan VVIP. Layanan jaminan kesehatan utama (Jamkestama) dari Jasindo diperuntukkan bagi anggota DPR RI dan keluarganya.

Delegasi BURT yang berkunjung ke SPH Padang dipimpin Elva Hartati. Hadir dua wakil lainnya, yaitu Agung Budi Santoso dan Novita Wijayanti. Anggota BURT yang turut dalam rombongan adalah Andi Fauziah, Refrizal, Syaiful Bahri, Irma Suryani, dan Muslim. ■

(tab), Foto: huaserv/mr

## Potensi Laut Wajib Untuk Kemakmuran Rakyat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan laut, aset yang sangat berharga ini tentu harus dikuasai, dijaga, dikendalikan dan dikelola serta dimanfaatkan dan dilestarikan secara sungguh-sungguh untuk kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

“Karena potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar tersebut, wajib digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Namun seiring dengan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan itu, hingga saat ini kesejahteraan dan kemakmuran rakyat masih belum terwujudkan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 14 Gubernur di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Daniel juga mengatakan, didalam pelaksanaannya juga masih menyisakan masalah yang belum tuntas, yakni pada saat mengatasi berbagai keresahan sosial yang terjadi. Hal itu sebagai dampak dari regulasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono juga menyatakan bahwa saat ini



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan berjabat tangan dengan salah satu Gubernur

kita sedang menghadapi sebuah kondisi anomali, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

“Contoh hal mendasar dan belum dapat terselesaikan hingga saat ini, yaitu terjadi pada saat rapat terbatas antara Presiden dan para Menteri baru-baru ini, dimana ditemukan ketidaksinkronan mengenai data

produksi dan data ekspor antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,” papar Ono Surono.

Dikatakannya, ada berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei independen, yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dibidang maritim sangat memuaskan, tetapi disisi lain kita masih mendengar dan melihat para nelayan yang tergabung dalam suatu asosiasi, himpunan atau serikat masih melayangkan protes.

Oleh karena itu, Komisi IV berharap pada RDP tersebut bisa mendapatkan informasi yang faktual dan benar yang terjadi dilapangan.

“Apakah kebijakan pemerintah yang selama ini dibuat sudah dapat dikatakan nyaman baik untuk Gubernur maupun rakyatnya atau malah sebaliknya,” tanya Ono.

Komisi IV juga akan mendukung semua kebijakan yang memang programnya adalah nelayan. Bahkan Komisi IV pernah menganggarkan APBN dengan nominal sebesar 13,8 triliun, sebuah angka yang sangat jauh bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. ■

(dep), Foto: Anindri/mr

## Diwarnai Beda Pendapat, Komisi II Setujui Terpidana Percobaan Dapat Maju Pilkada

Komisi II DPR RI akhirnya menyetujui terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal itu diputuskan berdasarkan hasil kesimpulan rapat saat RDP Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda pada Sabtu, (10/9) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

**K**etua Komisi II R a m b e K a m a r u l z a m a n menjelaskan keputusan itu tidak lagi semata-mata hukuman percobaan. Cakupannya jadi lebih luas, yaitu orang yang tidak dipenjara. "Intinya, orang yang tidak dipenjara, jadi tidak perlu repot," imbuh politikus Partai Golkar tersebut.

Hal itu seiring dengan UU Pilkada yang memang tidak diatur soal terpidana hukuman percobaan dilarang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Yang diatur hanya larangan terpidana mencalonkan diri. "Kalau sudah dipenjara, ya kan otomatis tidak bisa maju pilkada," ucapnya saat Rapat.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga telah mengatakan bahwa seorang yang berstatus terpidana memang tidak



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman

dibolehkan mencalonkan diri, kecuali *cubva levis* atau kealpaan ringan.

Sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit. Yakni anggota Komisi II Arteria Dahlan mengkritik hal tersebut. Arteria menjelaskan bahwa fraksinya menolak keras terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri

dalam pilkada.

Sebelumnya, pada Jumat, (9/9) Komisi II telah meminta masukan dari pakar soal keikutsertaan terpidana percobaan dalam Pilkada yakni Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir dan mantan Hakim Konstitusi Ahmad Syarifuddin Natabaya.

Mudzakir berpendapat, pada prinsipnya vonis pidana harus lewat putusan pengadilan. Menurut dia, dalam hukum pidana, seorang terpidana untuk tindak pidana ringan masih memiliki hak politik penuh kecuali dicabut oleh putusan hakim.

Adapun, terpidana yang tidak lagi memiliki hak politik adalah terpidana yang sudah masuk kategori berat. "Kalau itu masuk, berarti semua apapun yang diputus pengadilan harus dimasukkan. Sekecil apapun. Seperti pelanggaran lalu lintas," pungkas Mudzakir. ■

(6) foto: andri/inn

## Waspadai Pembentukan Holding BUMN Perbankan

Publik perlu mewaspadai isu pemerintah membentuk *holding* BUMN Perbankan. Agenda tersembunyi perlu dicermati, mengingat dengan pembentukan *holding* tersebut dikhawatirkan bisa membuat perbankan nasional terpuruk. Apalagi, pengelolannya juga masih sarat dengan kepentingan.

**A**nggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal tersebut dalam rilisnya yang diterima Rabu (14/9). Pemerintah melalui Kementerian BUMN memang diinformasikan akan membentuk *holding* perbankan terhadap Bank BTN, BRI, BNI, dan Mandiri. "Kita perlu mewaspadai isu pembentukan *holding* BUMN itu," katanya. Pembentukan *holding* BUMN perbankan harus jelas, transparan,



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, dibutuhkan kajian komprehensif dan terintegrasi agar tidak mengganggu profesionalitas, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan BUMN seperti diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Heri

## Marlinda Irwanti : Dosen Harus Lulusan S-2

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti mengaku prihatin terkait masih banyaknya dosen yang mengajar hanya dengan lulusan S-1, padahal dosen saat ini minimal harus lulusan S-2.

“ Saya sangat prihatin ketika diketahui jumlah dosen kita sekitar 230 ribu ternyata masih lulusan S-1, S-2 baru sekitar 120 ribuan berarti belum mencapai 50 persen padahal dalam Undang-Undang (UU) dan peraturan pemerintah menyatakan bahwa perguruan tinggi minimal di tahun 2017 dosennya itu harus S-2,” ujarnya disela-sela rapat dengar pendapat Panitia Kerja (Panja) beasiswa pendidikan tinggi dengan Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) di



Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Terkait hal ini politisi F-Golkar itu pun menanyakan bagaimana target yang dibuat oleh KemenristekDikti ketika akan menjalankan peraturannya bahwa tahun 2017 itu semua dosen S-1 harus S-2 ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar.

"Nah ini kan harus ditargetkan oleh KemenristekDikti melalui dananya. makanya Panja hari ini sebenarnya kita ingin melihat bentuk anggarannya. Jangan berbicara anggaran dulu. Kita bicara pola, sistem yang dibangun, bagaimana target yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dosen," tegasnya.

Lebih lanjut Merlinda mengatakan belum lagi berbicara terkait sertifikasi dosen yang baru 100 ribu, padahal kalau mau bersaing dengan negara lain apalagi sudah masuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) para dosen ini harus mempunyai sertifikasi dosen.

"Dosen tidak bisa disebut dosen kalau tidak

memiliki sertifikasi, dan ini tanggung jawab pemerintah mereka harus punya target 2017, sekitar 230 ribu dosen harus sudah sertifikasi. Nah hari ini kita bicara target mereka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Apa programnya kemudian bagaimana indikator-indikator pengukuran untuk bisa mencapai target baru kita bicara dana," tuturnya.

"Jadi jangan dibalik mereka minta dana dulu tetapi kita tidak tahu yang dibangun seperti apa, minimal dia harus punya target jadi kita tidak bicara lagi nanti 2018 mengenai sertifikasi dan dosen S-2. Sampai kapan negeri ini selesai untuk membangun," lanjutnya.

Selain itu Politisi Dapil Jawa Tengah X juga berbicara soal beasiswa. Ia menanyakan mengapa anak-anak kita lebih menyukai beasiswa dibawah Kemenkeu LPDP dibanding yang dibuat KemenristekDikti padahal dananya sama-sama dari APBN.

"Artinya pola kerja dan sistem yang dibangun belum benar, makanya kita ingin dibetulkan dulu sistemnya, polanya, indikatornya untuk memilih seseorang mendapatkan beasiswa baru bicara dananya. Kita dengarkan dulu mereka bagaimana membangun pola dan sistem untuk menyelesaikan permasalahan dosen dan beasiswa untuk mahasiswa baru bicara anggaran karena masalah kita ini *big data* kita tidak jelas," pungkasnya.

"Saya mendapatkan laporan, kalau beasiswa LPDP sistemnya bagus, polanya yang dibangun bagus mereka tidak pernah terlambat, lebih terjamin padahal mereka diluar negeri nah KemeristekDikti memiliki beasiswa di dalam dan juga kementerian lain Terlambat memberikan dananya untuk penelitian, dan bulanan, buku dan lain-lain masih banyak keterlambatan padahal mereka mengambil dan yang sama RAPBN, artinya pola kerja dan sistem yang dibangun belum benar makanya kita ingin dibetulkan dulu sistemnya polanya indikatornya untuk memilih seseorang mendapatkan beasiswa baru bicara dananya," tambahnya. ■

mengkhawatirkan keterpurukan BUMN ini dengan rencana pembentukan *holding* tanpa kajian mendalam. Ia mengutip data Dirjen Kekayaan Negara per Desember 2015 bahwa saat ini aset BUMN sekitar Rp5.752 triliun dengan utang Rp3.767 triliun, dan ekuitasnya hanya Rp1.732 triliun.

"Masalah BUMN secara umum adalah pengelolaan yang masih sarat kepentingan, jauh dari profesionalitas, dan masih kurangnya kreatifitas positif, karena terbentur aturan yang mengatur sebatas Badan Usaha," tandas Heri. Ia mencurigai adanya agenda tersembunyi dari gambar gembor pemerintah yang ingin membentuk *holding* di sejumlah BUMN. Dalam pandangan Heri, sebaiknya Kementerian BUMN fokus saja pada pembenahan aktivitas anak dan cucu perusahaan BUMN yang tidak terkontrol dan di luar *core*-nya.

Khusus untuk BUMN perbankan,

sambung Heri, pemerintah wajib memiliki cetak biru yang jelas terhadap penguatan fungsi perbankan nasional untuk memberi stimulus bagi usaha riil masyarakat. BUMN perbankan juga diharapkan jadi pionir reformasi sistem keuangan dan perbankan nasional. Dan *holding* perbankan ini berpotensi menghilangkan aset, kerugian keuangan, korupsi, dan usaha mengarahkan BUMN untuk kepentingan tertentu.

Tata kelola BUMN, ditegaskan Heri, juga terancam menjadi tidak profesional dan tidak efisien. "Saya mengharapkan pemerintah lebih fokus pada perbaikan BUMN secara menyeluruh dan tuntas, bukan sebatas pemberian PMN saja. Harus ada perubahan mendasar dan konstitusional. Revisi UU BUMN yang masih banyak mengatur 'Badan Usaha' dibanding 'Milik Negara', wajib didahulukan dan diselesaikan." ■

(mb), Foto: Rumi/mr

(rnm), Foto: Krasno/hr

## Revisi UU Perbankan Harus Ikuti Perkembangan Zaman

Wacana terhadap revisi UU tentang Perbankan memang harus mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Ada beberapa isu dalam UU ini yang perlu direvisi. Kemajuan teknologi, modus pidana perbankan, dan perkembangan perbankan internasional, jadi salah satu argumen revisi tersebut.

**D**emikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi, Rabu (14/9), di Media Center DPR RI. Semua perubahan zaman di bidang ekonomi dan hukum harus direspon oleh UU Perbankan. Maka, wacana revisi menjadi keniscayaan yang tak bisa terelakkan lagi.

Namun, untuk merevisinya, kata Sanusi, tak mudah. Butuh waktu panjang dan latar argumen yang sangat logis. Apalagi, bagi sebagian anggota DPR RI,



Acara forum legislasi tentang Revisi UU Perbankan

revisi UU ini belum dianggap prioritas. "Transparansi perbankan harus masuk dalam agenda revisi UU Perbankan. Selain itu, kepemilikan bank juga mesti diperjelas," papar Anggota F-PG itu.

Pembicara lainnya, Yenti Garnasih

pakar hukum pidana pencucian uang, mengatakan, revisi atas UU Perbankan sudah mendesak dilakukan. Apalagi, saat ini sudah ada UU Pengampunan Pajak yang pasti sangat berkolerasi dengan dunia perbankan. Jangan sampai perbankan jadi tempat parkir untuk mencuci uang.

Menurut Yenti, keterbukaan perbankan harus mulai dilonggarkan untuk kebutuhan penyidikan. Perbankan di Swiss saja, ungkap Yenti, sudah mulai melonggarkan diri terhadap penyidikan dan kebutuhan penelusuran dana ilegal dari negara-negara lain. ■

(amb), Foto: Rumi/br

## Hilirisasi Minerba Harus Ditegakkan

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan, Revisi Undang-Undang Minerba yang menjadi poin penting adalah hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, migas dan batu bara, sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

**D**emikian disampaikan Satya saat menerima kunjungan delegasi dari Ministry of Economy, Trade & Industry (METI) Jepang di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Selasa sore (13/9). Hadir diantaranya adalah Mr. Tsujimoto (Direktur Mineral Divisi SDA dan Energi), Mr. Iwata sebagai Direktur

Perdagangan Biro Asia Pasifik, Mr. Mukuzami (Deputi Direktur Mineral & SDA) serta Atase Bidang Energi Kedubes Jepang Mr. Kitamura.

"Kita konsisten, hilirisasi sektor minerba harus ditegakkan dan kita menghargai perhatian dari *stakeholder* industri, termasuk para investor dari negara sahabat Jepang," papar Satya dalam dialog dengan METI di ruang 1125.

Anggota Panja Minerba Komisi VII tersebut juga menyebutkan, audiensi dengan METI semata-mata diskusi dalam rangka memberi pemahaman bahwa saat ini di DPR RI sedang berlangsung pembahasan RUU Minerba. Hal ini untuk menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam membuat regulasi sektor minerba yang *win-win solution* bagi semua pihak, termasuk investor.

"Poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka dalam kerangka diskusi, supaya METI atau Kementerian lain di Jepang mengerti kira-kira undang-undang ini akan membuat baik hubungan kedua negara atau tidak," jelasnya.

Dia menambahkan, selama ini kerja sama ekonomi perdagangan dan industri antara Jepang dengan perusahaan-perusahaan Indonesia seperti BUMN dan swasta nasional sudah cukup baik, dan hubungan ini akan terus ditingkatkan agar saling menguntungkan.

"RUU Minerba masih dalam pembahasan di tingkat Komisi VII. Naskah Akademik masih dibahas setelah menampung masukan dari fraksi-fraksi untuk selanjutnya disusun Draft RUU nya. RUU Minerba nantinya akan menjawab keresahan semua pihak dengan semangat *win-win solution*," tandasnya. ■



Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha bersama Tim delegasi METI Jepang

(foto) / foto: armanis/foa

## Revisi Permenkes Kefarmasian untuk Perkuat BPOM

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengatakan revisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang di konsultasikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ke DPR RI terkait kefarmasian dilakukan untuk menambah kewenangan serta memperkuat BPOM.

Ada tiga Permenkes terkait kefarmasian yang dikonsultasikan ke DPR RI untuk disempurnakan. Ketiganya adalah Permenkes No. 30/2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, Permenkes No. 35/2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Permenkes No. 58/2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

"Dalam Permenkes itu, nantinya peran BPOM diperkuat. Pengadaan dan penyaluran obat nantinya atas pengawasan BPOM. Dengan itu, kemana obat itu masuk dan keluar bisa diawasi, sehingga bisa mencegah adanya obat-obat yang dipalsukan. Nantinya obat yang masuk dan keluar akan dicek BPOM, jika ditemukan ada obat dari sumber tidak resmi maka akan dilakukan pencegahan," ujar Irma disela-sela rapat dengar pendapat dengan BPOM di Gedung Nusantara I, Senayan, DPR RI, Kamis (8/9).

Lebih lanjut Politis F-Nasdem ini mengatakan pengawasan BPOM juga ditambah, tidak hanya ranah publik BPOM kini bisa mengawasi di ranah lebih dalam yaitu Rumah Sakit, Apotek dan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik, dll-red). Wewenang ini di berikan kepada BPOM karena tidak adil kalau Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang membuat regulasi tapi dia juga yang melakukan operasional.

"Nah ngak fair dong masa dia mengawasi dirinya sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Maka kita di komisi IX sepakat, agar Permen ini di juga di atur siapa yang bertanggung jawab, siapa regulator dan operatornya, agar semuanya jelas, jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa tunjuk hidung, karena ada dasar hukumnya," tegas Irma.

Permen ini direvisi memang semata-mata untuk

memperkuat BPOM. Harapannya semua permasalahan bisa terurai oleh Badan POM bisa bersama-sama dengan Bareskrim melakukan penggerebekan, sidak, sita dan juga bisa mengawal kasus sampai ke pengadilan. "Ini yang komisi IX

inginkan sehingga setiap kasus yang terjadi itu jelas efek jeranya bagi pelaku," pungkasnya. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani

## Polri Tidak Perlu *Reacted* Atas Kasus SP3 Pembakaran Hutan

Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang meminta kepolisian tidak perlu terlalu *reacted* terhadap kasus penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) terhadap 15 perusahaan atau korporasi yang menjadi tersangka pembakaran lahan hutan pada Januari 2015 lalu.

"Keluarnya SP3 dalam kebakaran hutan ini kan masalah penegakan hukum. Kalau ada yang keberatan silahkan melalui pra peradilan, jadi Polri tidak perlu *reacted* terhadap hal itu," kata Junimart yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan jajarannya, di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, baru-baru ini.

Sementara itu anggota Komisi III lainnya, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa sejatinya setiap SP3 yang dikeluarkan Polri langsung dirilis ke publik di waktu yang sama. Hal itu untuk menghindari praduga atau kecurigaan publik terhadap instansi Polri. Oleh karena



Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang

itu Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini berharap Polri dapat meningkatkan

komunikasi ke publik melalui media massa ataupun lainnya.

Sebagaimana penjelasan Kapolri, Tito Karnavian bahwa terbitnya SP3 terhadap 15 perusahaan itu tidak secara bersamaan, melainkan bertahap atau pada bulan yang berbeda-beda sesuai dengan hasil penyelidikan. Ditambahkan Tito, bahwa keluarnya SP3 itu sudah dievaluasi oleh Tim Propam dan Bareskrim dan hasilnya memang pihak kepolisian tidak memiliki cukup bukti yang memastikan 15 perusahaan tersebut sudah melakukan pembakaran lahan hutan dengan tujuan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. ■

## Terbitnya SP3 Kasus Karhutla Merupakan Masalah Serius

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai kasus masalah terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sejumlah perusahaan yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang sangat serius. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan usai menggelar rapat internal Panja Pengawasan Karhutla di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

“ Ini masalah yang sangat serius. Kepolisian menetapkan sejumlah perusahaan menjadi tersangka, namun secepat halilantar Polda di sejumlah daerah malah menerbitkan SP3 terhadap perusahaan tersebut,” ujar Benny.

Oleh karena itulah Panja Karhutla akan meminta penjelasan dari 15 perusahaan yang diterbitkan SP3, lanjut Benny. Pihaknya juga akan mempertanyakan *legal standing* perusahaan tersebut, mengingat ada

indikasi perusahaan fiktif dari perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, Panja juga akan mengundang sejumlah saksi ahli di bidang hukum lingkungan dan LSM Pemerhati Hutan dan Lingkungan.

"Dalam beberapa minggu ke depan Panja Pengawasan Karhutla ini akan selesai. Dan panja akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang dianggap berkepentingan dalam proses penegakan



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman

hukum kasus ini dan merumuskan kebijakan untuk mengupayakan solusi agar masa depan permasalahan hukum seperti ini tidak terulang lagi," pungkas Benny.

Sementara itu Anggota Komisi III lainnya, Arsul Sani sebelumnya melihat ada kejanggalan dari penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan di Riau. Ia menilai penyidik belum optimal mencari alat bukti terkait kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui, tahun 2015 lalu Polda Riau menangani 18 perusahaan yang menjadi tersangka pembakaran lahan dan hutan. Dari jumlah itu, tiga kasus dinyatakan lengkap dan dilanjutkan ke proses pengadilan, satu di antaranya membebaskan perusahaan tersebut, dua kasus lainnya masih menunggu putusan hukum.

Sedangkan 15 perusahaan tersangka lainnya mendapat SP3 oleh Polda Riau. Kelima belas perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam, PT Rimba Lazuardi, PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur, dan PT Wahana Subur Sawit. ■

(Ayu), Foto: Arnef/mr

## Lokasi Hotel Jemaah Haji Indonesia di Madinah Masih Terlalu Jauh

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai fasilitas hotel bagi Jemaah Haji Indonesia di Madinah, khususnya persoalan lokasi, masih terlalu jauh, meskipun telah berada di area lingkaran (ring) satu di Masjidil Haram.

“ Sejauh ini kondisi hotel di Madinah, sejumlah 115 buah yang disewa bagi jemaah haji terletak di ring satu, namun waktu yang sama di Makkah tidak banyak peningkatan, karena masih ada hotel dengan jarak mencapai 4.398 M. Jarak sejauh itu sudah pasti jemaah lansia sulit ke mesjid,” jelas Iskan, melalui siaran pers kepada Parlemen, saat mengawasi pelaksanaan ibadah haji DPR RI di

Arab Saudi, baru-baru ini.

Menurut Iskan, Kementerian Agama (Kemenag) selama ini dinilai belum transparan menyangkut fasilitas bagi Jemaah Haji Indonesia di tanah suci. Sebab, selama ini Kemenag hanya menyampaikan data yang sangat normatif dan tidak substantif. Hal itu membuat Komisi VIII DPR RI kurang optimal dalam fungsi pengawasan.

"Data yang disampaikan hanya sekitar

tahapan penyelenggaraan haji yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, namun pada waktu yang sama proses tender, pengelolaan APBN, dan dana masyarakat yang dikelola Kemenag seolah tertutup rapat," papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Belum idealnya fasilitas bagi Jemaah Haji Indonesia ini, menurut Iskan, semakin menguatkan upaya untuk memisahkan antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji. Apalagi, menurut Iskan, Kemenag mengendalikan dana lebih dari Rp50 triliun, namun tidak dikelola secara profesional, sehingga tidak bermanfaat secara optimal bagi Jemaah Haji Indonesia.

"Untuk petugas haji saja, tercatat saat ini di Makkah berjumlah 856 orang, PPIH Kemenag sebanyak 267 orang, PPIH Kemenkes berjumlah 162 orang. Belum

## Komisi II DPR RI Terima Masukan Terkait DOB

Komisi II DPR RI menerima audiensi Tim Pemekaran Kabupaten Paser Selatan (Pasel) dan Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) pada Rabu, (14/9), di Gedung DPR RI, Jakarta. Kedatangannya dimaksud untuk memberikan aspirasi mengenai alasan pemekaran daerah di kabupaten tersebut.

Dalam paparannya, tim pemekaran Pasel menyampaikan bahwa alasan pemekaran kabupaten tersebut adalah untuk pemerataan pembangunan dan sebagai solusi pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat. Rencananya Kabupaten Pasel akan membawahi 5 kecamatan yang terdiri dari 52 desa.

Ketua Tim Pemekaran Kabudaya Sarmidi menyampaikan agar penetapan Pasel sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) jangan ditunda lagi karena hal ini merupakan aspirasi masyarakat. "Kabudaya menyimpan banyak potensi alam seperti emas, batubara, kayu log dan lainnya. Pemekaran Kabudaya semakin mendesak karena terdapat dua masalah utama yakni sengketa batas wilayah negara RI-Malaysia dan terjadinya ketimpangan kesejahteraan di daerah tersebut," uja Sarmidi.

Menanggapi permintaan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Hetifah menyampaikan pertemuannya kali ini

akan dijadikan catatan Komisi II untuk mengangkat kembali isu DOB. "Saya kira pertemuan ini menjadi catatan, kita akan mengangkat kembali isu perbatasan dan isu DOB ke dalam agenda kerja Komisi II," tutur Hetifah.

"Lepas dari situasi yang menjadi batasan dan tantangan ekonomi global. Karena ini justru menjadi titik masuk pada persoalan ekonomi kita jika penataan daerah diperbaiki dalam percepatan pembangunan," sambungnya.

Politisi Partai Golkar ini pun mengatakan, kondisi di Kalimantan Utara memang cukup memprihatinkan, sehingga wajar jika masyarakat disana lebih banyak berkunjung ke Malaysia untuk menghabiskan waktunya.

"Keadaan puskesmas disana tidak memiliki tempat rawat inap. Sedangkan

mahasiswa dan mualimin, yang tinggal di sana, sehingga efektif dan efisien," kata Iskan.

Belum maksimalnya pelayanan haji tersebut juga berlaku untuk fasilitas kesehatan. Hal itu sebagaimana tercatat di Kementerian Kesehatan bahwa sebanyak Jemaah Haji Indonesia yang meninggal sebanyak 70 (tujuh puluh) orang karena menderita sakit jantung.

"Banyaknya korban meninggal karena jantung itu, disebabkan fasilitas kesehatan tidak memadai. Selama ini fasilitas hanya sekelas klinik pratama, padahal Indonesia harusnya punya rumah sakit sendiri di Saudi," pungkasnya. ■



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis

lagi Temus Kemenag berjumlah 159 orang, Temus Kemenkes 159 orang, dan Temus Transportasi berjumlah 118 orang. Namun dengan jumlah sebanyak itu, terlihat layanan masih di bawah standar, padahal yang dibutuhkan tenaga lapangan dari



Suasana Rapat Komisi II dengan Tim Pemekaran Kabupaten Pasel dan Kabudaya

di Malaysia itu cukup 15 menit. Wajar jika mereka memiliki identitas ganda, ini bukan karena mereka tidak nasionalis," jelas Hetifah.

Ia pun menegaskan bahwa tim pengawas daerah perbatasan yang dibentuk DPR RI akan siap bekerja. "Dan itu akan bekerjasama dengan tim pengawas daerah perbatasan yang dibentuk DPR RI. Namun harus segera rekomendasi pertemuan hari ini untuk bertugas. Jadi setelah dibentuk harus menjalankan tugas sebaik-baiknya," terangnya.

Legislator dapil Kaltara ini pun juga mengatakan Komisi II juga akan memanggil Dirjen Otda Kemendagri dan BNPP agar dapat menjadi *leading sector* yang merekomendasikan daerah perbatasan sehingga pemerintah lebih proaktif.

"Kami juga akan memanggil Dirjen Otda Kemendagri dan BNPP. Agar mereka bisa bersama kita menjadi *leading sector* yang merekomendasikan daerah-daerah seperti Bumi Dayak. Jadi pemerintah yang lebih proaktif. Juga tentunya di Paser Selatan, kita minta agar 55 daerah yang kita seleksi dan layak secepatnya menjadi prioritas," pungkas Hetifah. ■

## Pemerintah Diminta Bedakan antara BOS SMA dan SMK

Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir meminta kepada Pemerintah untuk membedakan dan memisahkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan SMK. Pasalnya, hingga saat ini, BOS untuk kedua sekolah tingkat menengah itu masih disamakan, terutama dari segi jumlahnya.

Padahal, SMK membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dibanding SMA, karena harus melakukan serangkaian kegiatan praktikum.

Demikian dikatakannya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke sejumlah SMK di Kota Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini. Kunjungan dalam rangka meninjau pendidikan vokasi ini, meninjau SMKN 2 Bandung, SMK Negeri 9 Bandung, SMK Negeri 13 Bandung dan SMK Igaras Pindad.

"Di RKA Kemendikbud, BOS SMA dan SMK masih disamakan, sebesar Rp 1.400.000 setahun per siswa. Padahal SMK membutuhkan bahan praktek yang lebih dari SMA. Jadi BOS SMK harus lebih tinggi dari SMA, karena kondisi kebutuhan

riil lapangan yang akan menunjang proses belajar mengajar, terutama alat praktikum bagi siswa SMK," pinta Dony.

Apalagi, tambah politisi F-PPP itu berbagai sarana dan prasarana SMK pun terbilang cukup mahal. Bahkan ketika dalam peninjauan beberapa sekolah, ia melihat banyak peralatan yang harus diperbaiki, bahkan diganti. Ia pun berharap, pembedaan ini bisa dimulai pada tahun mendatang. Namun ia berjanji hal ini dapat direalisasikan.

"Saat ini pembahaasan belum final, karena masih ada pembahasan

antara Komisi X dengan Kemendikbud. Akan kami perjuangkan BOS SMK lebih besar daripada SMA dan dapat direalisasikan pada tahun 2017," komitmen Dony.

Dalam kesempatan itu, Dony juga menyoroti masalah minimnya jumlah

diharapkan dapat memberikan anggaran yang memadai untuk SMK.

"SMK telah terbukti menghasilkan SDM yang handal, terampil dan siap untuk bekerja. Jadi mereka memiliki keahlian yang siap bekerja, dan banyak ditampung oleh

perusahaan yang membutuhkan. Berarti dengan adanya SMK telah bisa mengurangi angka pengangguran, dan menciptakan lapangan pekerjaan," imbuh Dony.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi (F-PKB) juga menekankan pentingnya pembedaan besaran BOS SMA dan

SMK. Pasalnya, tambah politisi asal dapil Jawa Barat itu, dengan banyaknya praktikum di SMK, dibutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi.

Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Nuroji (F-Gerindra) ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjuran (F-PG), Sohibul Iman (F-PPS), dan Dony Ahmad Munir (F-PPP). ■



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau sejumlah SMK di Bandung

guru produktif dan sarana prasarana SMK di Bandung. Menurutnya, dengan banyaknya program studi di SMK, masih dibutuhkan banyak guru yang memiliki kualifikasi tertentu.

"Jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasinya masih minim. Walaupun SMK meningkatkan kapasitas guru, tetapi mereka masih memiliki kekurangan guru yang memiliki kualifikasi tertentu," nilai Dony.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap Pemerintah semakin memperhatikan SMK. Mengingat Pemerintah pun sudah memprioritaskan pada pendidikan vokasi, sehingga

## Target Pertumbuhan Ekonomi 5,1 persen Perlu Pendalaman

Badan Anggaran DPR RI belum menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen dikarenakan asumsi ini dinilai terlalu pesimistis, sehingga harus dibahas kembali.

Hal tersebut diperoleh dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Deputy Gubernur Bank Indonesia serta perwakilan pejabat dari Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, (13/9) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Terhadap inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan target pembangunan ekonomi apakah bisa disetujui?" tanya Said Abdullah selaku ketua rapat. "Setuju," dijawab seluruh anggota Banggar yang hadir.



Wakil Ketua Banggar Said Abdullah

Dalam pembahasan awal panja asumsi, defisit anggaran, dan pembiayaan tersebut, Banggar belum bisa menerima alasan

perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 persen menjadi 5,1 persen "Ini harus dikonsolidasikan lagi dan dibahas dalam tahap pendalaman. Kita lanjutkan Rabu, (14/9)," ujar Said.

Sementara asumsi yang sudah disepakati adalah inflasi 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, nilai tukar Rp13.300 per dolar AS, ICP \$45 per barel, *lifting* minyak 815.000 barel per hari, *lifting* gas 1.150.000 barel per hari,

target pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, gini rasio 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1. ■

(opsi), Foto: Jayadi/jk

## Perlu Ada Mekanisme Regenerasi Petani Indonesia

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pertanian Indonesia adalah tidak ada mekanisme regenerasi yang cukup baik. Hasil sensus pertanian tahun 2013 menyatakan bahwa ada penurunan jumlah keluarga petani sebesar 5 juta petani dalam setiap kurun waktu 10 tahun, yakni dari sebanyak 31 juta petani menjadi 26 juta petani.

“ Kalau tersisa 26 juta petani, maka dalam waktu 50 tahun kedepan sudah tidak akan tersisa lagi. Mungkin juga telah digantikan oleh mesin-mesin, jika tidak ada mekanisme regenerasi yang tepat dalam mengurus petani,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Rapat Dengar



Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron

Pendapat Umum dengan para pakar terkait RUU Sistem Budi Daya Tanaman, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Dalam sistem budi daya tanaman, harus ada insentif yang cukup, untuk dijadikan sebagai trigger bagi generasi muda agar mau ikut berpartisipasi di dalam usaha budidaya tanaman.

Sebab didalam memori generasi muda sekarang, masih memandang sosok petani sebagai pelaku budi daya tanaman, sama seperti pada era jaman penjajahan.

Sehingga hal ini juga yang menjadikan kerisauan bahwa umur pertanian negara Indonesia, mungkin tinggal 10 sampai 20 tahun saja.

" Di Merauke, rata-rata tinggi

rumputnya lebih tinggi dari tanaman padinya. Hal ini dikarenakan sudah tidak terurus dengan baik, satu orang menanggung beban untuk mengurus 8 hingga 10 hektar," ucap Herman.

Menurutnya, Komisi IV telah mendorong adanya mekanisasi kesana, tetapi masih tidak mampu untuk bisa menghilangkan serangan gulma.

"Untuk menanam dan mengolah lahan mereka masih mampu, tetapi ada hal lain yang tidak bisa lepas dari kemampuan dan keberadaan seorang petani," tandas politisi F-Demokrat itu.

Setelah mendengar paparan yang disampaikan oleh para pakar dalam RDPU tersebut, Komisi IV DPR RI banyak melihat celah-celah yang selama ini masih menjadi kelemahan, dan akan dijadikan bahan catatan penting saat akan membahas RUU Sistem Budi Daya Tanaman dengan mitra kerjanya di pemerintah. ■

(dep), Foto: Anandri/mr

# Kepri Harapkan Pengelolaan Tol Laut Dilakukan Swasta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepri di Gedung Graha Kepri di Batam Centre, baru-baru ini.

**T**im Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Panja Michael Wattimena meminta masukan Pemerintah Prov. Kepri terkait dengan program tol laut dan wacana untuk memperkuat tol laut dengan memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kapal.

Gubernur Prov. Kepri, Nurdin Basirun dalam pertemuan ini menyampaikan saran agar pengelolaan tol laut dapat dilakukan dengan sistem swastanisasi. Tujuannya tidak lain untuk memberikan daya saing dan di sisi lain Pemerintah juga dapat mengurangi subsidi BBM terhadap kapal dan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya.

"Swastanisasi ini sangat penting sampai kapan Pemerintah memberikan subsidiinya?!", tegas Nurdin.

Nurdin menilai, jika pengelolaan tol laut diserahkan ke swasta, sedikit banyak dapat mengurangi beban kerja pemerintah. Karena swasta akan berpacu dalam memenuhi target kebutuhannya.

"Jadi pemberian subsidi dari Pemerintah pun bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti halnya dipelabuhan yang terkait dengan program tol laut," ujar Nurdin.

Untuk swastanisasi di tol laut itupun harus didukung Kepala Kantor Danlatamal IV, Bambang Gunawan. Menurutnya dengan swastanisasi, akan banyak pihak swasta yang tertarik untuk terlibat dalam program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Bambang Gunawan, Kepala Kantor Danlatamal IV memberikan masukan bahwa, persoalan kita harusnya bukan soal pelabuhan lagi atau ada tidaknya kapal. Itu kalau tol laut bisa diberikan pengelolaannya ke swasta.



Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena

Terkait dengan tol laut, Anggota Komisi III DPRD Prov. Kepri, Irwansyah juga meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi antar Kabupaten/Kota di Kepri. Khususnya di Anambas dan Natuna. Termasuk juga

memadai.

"Pemerintah Pusat akan membantu pendanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Tapi pengelolaannya tidak bisa melalui swasta, karena nanti tidak banyak yang masuk ke negara." Kata Rendy. ■

(Grup). Foto: Eka Huda/Inf

## Jawa Tengah Layak Menjadi Provinsi Vokasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fiqri Faqih mengatakan Jawa Tengah layak dinobatkan menjadi Provinsi vokasi, pasalnya pemerintah Prov. Jawa Tengah memberikan perhatian penuh kepada sekolah kejuruan.

“Memang layak kalau provinsi ini (Jawa Tengah) dinobatkan sebagai provinsi vokasi, wujudnya sudah ada, seperti SMK Negeri Jawa Tengah sebagai satu-satunya SMK yang mampu dan di biayai total oleh pemerintah provinsi.” ujar Abdul Fiqri Faqih, di Semarang, Jum'at (9/6) saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke 3 sekolah kejuruan yakni SMKN 6, SMKN 7 (STM Pembangunan) dan SMKN Jawa Tengah.

Sekedar informasi, SMK Negeri Jawa Tengah merupakan sekolah menengah kejuruan yang khusus diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui proses penyaringan berbagai wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Seluruh biaya pendidikan ditanggung

## Baleg Bahas DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Rapat Pleno tersebut membahas kompilasi DIM hasil kunjungan kerja Baleg ke beberapa provinsi.

“Ini yang akan menjadi fokus pembahasan. Dari sekian DIM, kita kategorisasi hal apa saja yang menjadi krusial,” ungkap Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (14/9).

Ia mengatakan, kunjungan kerja Panja RUU Karantina Kesehatan menghasilkan 27 masukan. Masukan tersebut akan digabungkan

dengan DIM yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi, sehingga berjumlah 546 yang semula 519



Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo

DIM

Setelah melakukan kategorisasi, ditemukan 16 DIM yang tergolong krusial karena akan mempengaruhi muatan materi RUU tersebut. Diantaranya, terkait judul dan definisi kekarantinaan kesehatan.

"Salah satu isu krusialnya adalah perubahan judul RUU, ada yang mengusulkan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Tapi ada juga fraksi yang mengusulkan agar namanya itu dijadikan satu," papar politisi dari dapil Jawa Timur itu.

Diketahui, dua Fraksi mengajukan usulan perubahan judul. Salah satunya Fraksi Nasdem yang mengajukan perubahan judul menjadi RUU Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk membedakan dengan karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

"RUU itu kita fokuskan

pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga ada penambahan kata masyarakat tidak hanya kesehatan saja" ujar Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem).

Sementara, Fraksi PDI-P mengusulkan perubahan judul menjadi RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pangan, Hewan, Tumbuhan, dan Lingkungan Hidup.

Disamping itu, isu krusial lainnya yang menjadi perhatian Anggota Baleg ialah lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat, apakah akan menjadi otoritas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

"Juga soal kelembagaan dan otoritas yang akan menyatakan status kedaruratan sehingga masuk dalam kategori kekarantinaan. Hal ini masih menjadi isu krusial dalam pembahasan RUU Kekarantinaan Kesehatan," imbuh Dossy. ■

oleh Pemerintah dan siswa diwajibkan tinggal di asrama selama masa pendidikan.

Selama melakukan peninjauan Tim Kunker berdialog langsung dengan tenaga pengajar dan para pelajar. Bertempat di aula SMKN Jawa Tengah, sejumlah siswa dengan lugas menyampaikan aspirasi, pertanyaan dan berbagi pengalaman yang umumnya mengenai dunia pendidikan Indonesia. Hal ini mendapat apresiasi tinggi dari para Anggota DPR RI, bahwa pendidikan karakter di SMKN telah berhasil.

"Dari semua pertanyaan tidak ada yang mengeluhkan dirinya sendiri, artinya SMKN Jawa Tengah berhasil mencetak calon kader masa depan yang berkarakter, Insya Allah berhasil!" ujar



Tim Komisi X DPR RI berfoto dengan murid SMKN Jawa Tengah

Noor Achmad Politisi Partai Golkar dapil Jateng II.

Lebih lanjut Komisi X DPR RI berharap agar langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi inspirasi secara umum untuk

pemerintah-pemerintah daerah lain dan sebagai aspirasi untuk Pemerintah Pusat agar program ini dikloning sebagai kebijakan yang layak diterapkan di provinsi lain. ■

## DPR RI Minta Pemerintah Evaluasi Apotek Rakyat

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta keberadaan apotek rakyat perlu ditinjau dan dievaluasi. Saleh Partaonan Dauly, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengatakan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2007 tentang Apotek Rakyat perlu ditinjau dan dievaluasi. Apalagi, belakangan ini, banyak obat palsu yang ditemukan di beberapa apotek rakyat.



Pimpinan Komisi IX DPR RI

Menurutnya tentang Apotek Rakyat yang menjadi dasar apotek rakyat beroperasi masih merujuk pada UU kesehatan lama, Nomor 23/1992. Padahal, sudah ada UU kesehatan yang baru, No. 36/2009.

Alhasil, menurut Saleh, keberadaan apotek rakyat harus dievaluasi agar sesuai dengan semangat UU Kesehatan yang baru.

"Apotek rakyat itu di satu pihak bisa m e m u d a h k a n masyarakat untuk memperoleh obat, namun di sisi lain bisa juga dijadikan tempat mengedarkan obat-obat palsu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Karena itu, permenkesnya perlu dievaluasi. Kalaupun apotek rakyat dibolehkan beroperasi, namun harus diteguhkan pola pengawasannya," jelasnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/9).

Permenkes, kata politisi PAN ini, harus sejalan dengan aturan yang baru. Selain Permenkes tentang apotek rakyat, saat ini Kemenkes juga sudah merevisi beberapa Permenkes lain.

Permenkes yang sudah direvisi itu adalah Permenkes No. 30/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Permenkes No. 35/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan Permenkes No.58/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Artinya, Permenkes yang baru saja dibuat jika dinilai tidak sejalan dengan pengawasan dan pelayanan kesehatan dapat direvisi.

"Tentu merevisi sebuah aturan hukum diharapkan tidak menyebabkan kekosongan hukum. Karena itu, arah perubahan aturan hukum adalah revisi dan penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan yang ada," kata Saleh dari Dapil Sumut II itu. ■

(a), Foto: Rizka/mr

## Komisi V Bahas Anggaran Fungsi Dan Program Eselon 1 Kemen PUPR

Komisi V DPR RI menggelar RDP dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, dengan agenda pembahasan tentang rincian anggaran untuk fungsi dan program unit organisasi Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA 2017, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

“Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai rincian rencana kerja dan Anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk program kegiatan strategis Tahun Anggaran 2017,” ujar Wakil Ketua Komisi

V DPR RI Lasarus yang memimpin rapat tersebut.

Komisi V DPR RI juga menyepakati program dan kegiatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2017 akan disinergikan dan disesuaikan dengan masukan dari Komisi V DPR RI mengenai program pembangunan daerah pemilihan pada provinsi/kabupaten/kota tertentu.

Dewan juga menyetujui untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran



Wakil Ketua Komisi V Lasarus

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai program dan kegiatan yang ditargetkan pada Tahun 2017, sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI. ■

(dip)/fotocamatri/nc

## DPR RI dan Pemerintah Sepakat Kaji Izin Ekspor Konsentrat

DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengkaji lebih dalam perpanjangan izin ekspor konsentrat. Kesepakatan ini tertuang dalam kesimpulan Komisi VII DPR RI dengan Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan.

Rapat kerja yang digelar Kamis (1/9) sore itu, dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi. Wacana memperpanjang izin ekspor konsentrat ini sudah jadi perdebatan publik. Plus minusnya harus ditimbang dengan matang. Sebelumnya, izin ekspor konsentrat dikeluarkan Pemerintah pada 10 Agustus 2016 lalu. Dan Komisi VII akan menagih hasil kajian Kementerian ESDM dalam waktu dekat.

Soal izin ekspor konsentrat ini menjadi salah satu butir kesimpulan dalam raker tersebut. Kesimpulan lainnya menyangkut roadmap pembangunan *Strategic Petroleum Reserve* (SPR). Kementerian ESDM diminta menyusun



Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi (F-PD)

*roadmap* tersebut sekaligus melakukan upaya peningkatan cadangan operasional BBM dengan melibatkan banyak *stakeholder*. Bentuk pelibatan itu adalah kerja sama PT. Pertamina dengan

perusahaan swasta nasional.

Selain itu, Komisi VII juga dalam kesimpulannya menyatakan, akan segera menetapkan asumsi makro sektor ESDM dalam RAPBN 2017. Penetapan tersebut dilakukan setelah melakukan pendalaman data *lifting* bersama SKK Migas dan KKKS.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo yang dihubungi Jumat (2/9), menjelaskan, penentuan *lifting* migas akan dihitung secara tepat. Di sisi lain, perlu ada pembenahan sistem kerja di Kementerian ESDM. "Perubahan *mindset* dan tata kelola juga akan memaksimalkan segala potensi bangsa dalam penemuan cadangan baru migas di laut dalam" kata Anggota F-Hanura itu. ■

(cc) foto: jabab/mr

## BPOM Perlu Kerjasama dengan Kominfo Terkait Maraknya Makanan Kadaluarsa

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan terkait maraknya makanan kadaluarsa yang diperjualkan-belikan di media *online* (daring), Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) harus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan informasi untuk menutup penjualan *online* yang tidak memiliki ijin edar.

“ Kami sudah meminta Badan POM untuk bekerja sama dengan pihak Kominfo untuk melihat suatu makanan yang tidak memiliki ijin edar, ini memang membutuhkan orang dibidang IT untuk melakukan pemantauan karena apa yang beredar di dunia maya sangat signifikan dan hal ini butuh dukungan dari Kominfo,” ujar Dede di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Terkait hal ini, menurut Dede, Komisi IX akan membuat Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memberikan kewenangan lebih kepada

BPOM. Karena BPOM memiliki perangkat untuk penggalan data, informasi maupun secara kimiawi namun belum memiliki payung hukum untuk menelusuri suatu kasus secara mendalam.

"Tetapi untuk menunggu sampai dibuat UU saya rasa lama, mungkin Peraturan Presiden (Perpres) yang di sampaikan presiden bisa digunakan untuk memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menyelidiki secara meyeluruh, komprehensif dan melakukan penangkapan

barang bukti," tutur politisi Fraksi Demokrat tersebut.

Diharapkan dengan adanya Perpres tersebut, masalah terkait b a h a n yang tidak layak pakai atau kadaluarsa dapat diselesaikan oleh Badan POM. ■



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

(rmm), Foto: Rizka/mr

## Rutinitas Olahraga Anak-anak Harus Dibiasakan Sejak Dini

Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menjadikan olahraga sebagai kebutuhan keluarga. Rutinitas olahraga juga harus dibiasakan sejak dini. Demikian dikatakannya kepada Parlemenaria via telepon, Selasa (13/9) terkait Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang jatuh setiap 9 September.

Apalagi, tambah Dwita, berdasarkan data dari Badan PBB untuk Urusan Anak-Anak (UNICEF), jumlah anak-anak kegemukan atau obesitas di Indonesia, tercatat paling tinggi di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara, yaitu 12,2 persen, jauh dibanding Thailand dan Malaysia yang dibawah sepuluh persen.

"Meningat anak-anak adalah generasi penerus bangsa, maka kita sebagai orang tua harus mewariskan kebiasaan olahraga sejak dini. Obesitas itu berbahaya bagi kesehatan, salah satu cara untuk mencegah obesitas pada anak harus menjadikan olahraga sebagai kebutuhan keluarga," saran Dwita.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, agar anak-anak dapat menyukai olahraga, orang tua bisa memberi kebebasan kepada si anak agar memilih olahraga sesuai dengan keinginannya. "Sangat banyak jenis



Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi

olahraga, yang penting dilakukan secara teratur. Jangan lupa juga mengonsumsi makanan sehat usai berolahraga," imbuh Dwita.

Dwita menilai, olahraga tidak hanya memberikan tubuh yang sehat, tetapi olahraga juga akan membuat pikiran anak jadi segar kembali. Apalagi anak-anak saat ini sangat menggemari bermain *gadget*.

"Anak-anak sekarang hampir sebagian waktunya dihabiskan untuk belajar dan bermain *gadget*, dengan menjadikan olahraga sebagai kebutuhan dalam keluarga, kita juga jadi dapat mengontrol anak bermain *gadget*. Dengan demikian waktu bersama keluarga jadi lebih sehat dan akrab dengan kebiasaan olahraga bersama," ujar Dwita.

Politisi asal dapil Lampung itu melihat, di beberapa daerah sudah tersedia fasilitas olahraga umum. Khusus di Bandar Lampung, Lampung, ia mencontohkan di Lapangan Saburai dan GOR Pemuda Way Halim.

"Bisa bersepeda bersama, jalan santai. Apalagi Pemerintah Kota sudah melaksanakan *car free day* setiap minggu didekat tugu Adipura, tentunya harus disambut dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk olahraga bersama keluarga," pesan Dwita. ■

(g), Foto: Arzka/mr



Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

## Pemerintah Harus Perhatikan Ketersediaan Guru SMK

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan, Pemerintah harus memperhatikan ketersediaan guru tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pasalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru PNS, walaupun sekolah berada di perkotaan. Ia menilai, rata-rata jumlah guru PNS tidak melampaui angka 60 persen.

Demikian dikatakannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke sejumlah SMK di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/9). Kunjungan

dalam rangka meninjau pendidikan vokasi ini, meninjau SMKN 2 Bandung, SMK Negeri 9 Bandung, SMK Negeri 13 Bandung dan SMK Igaras Pindad.

"Maka tentunya Pemerintah harus memperhatikan benar pembukaan

## Jargon SMK Bisa Harus Terwujud

Jargon "SMK Bisa" yang telah digencarkan Pemerintah sejak lama, harus diwujudkan. Apalagi jika kebijakan Pemerintah ingin mengedepankan pendidikan vokasi sebagai sarana pembangunan bangsa.

**D**emikian ditekankan Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat memimpin kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke SMK Negeri 2 Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/9). Kunjungan ini dalam rangka peninjauan pendidikan vokasi di Provinsi Jawa Barat. Selain ke SMKN 2 Bandung, tim Komisi X DPR RI juga meninjau SMK Negeri 9, SMK Negeri 13 dan SMK Igaras Pindad.

"Jargon SMK Bisa harus diwujudkan. Pasalnya, selama ini belum terlihat, karena mungkin adanya pengurangan anggaran di bidang pendidikan," kata Nuroji, saat memberikan sambutan didepan beberapa Kepala Sekolah SMK, guru SMK, hingga jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, untuk mewujudkannya, SMK harus didukung dari berbagai aspek, seperti anggaran hingga jumlah guru yang memadai. SMK harus didukung dengan berbagai fasilitas, sehingga menghasilkan lulusan yang unggul.

"Permasalahan SMK ini bukan hanya jumlah, namun kualitas masih banyak kekurangan, sehingga perlu peningkatan. Untuk itu, tahun ini DPR RI dan

program studi (prodi) di SMK-SMK dengan ketersediaan guru yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada, sehingga kesulitan mencari guru produktif bukan menjadi masalah lagi," tegas Dadang.

Apalagi, tambah politisi F-Hanura itu, bagi sebagian orang mengajar bukanlah profesi yang menjanjikan jika dilihat dari sisi pendapatan. Maka banyak orang yang memiliki keahlian khusus, merasa lebih menguntungkan bila bekerja di perusahaan, dibandingkan dengan mengajar di SMK. Karena dianggap lebih menjanjikan pendapatan jika bekerja di perusahaan.

"Dengan rasio satu guru harus

P e m e r i n t a h mengalokasikan Rp 427 miliar untuk bantuan kepada SMK di luar KIP dan BOS," imbuh Nuroji.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga memastikan, pada A P B N t a h u n mendatang, Komisi X DPR RI mengusulkan agar BOS SMK dan SMA dipisahkan, karena biaya operasional SMK lebih tinggi dibanding SMA.

"Kami perjuangkan, agar Mendikbud harus mengalokasikan anggaran khusus untuk SMK, jika Pemerintah ingin mengedepankan pendidikan vokasi untuk sarana pembangunan bangsa. Pemerintah juga harus menganggarkan bantuan peralatan praktek, dan guru-guru," tegas Nuroji.

Dalam kesempatan yang Kepala Sekolah SMKN 2 Bandung, Tatang Gunawan mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan sekolah yang dipimpinnya.

berbanding 15 siswa di SMK, maka tentu bukanlah persoalan yang mudah bagi Indonesia untuk menjaga suplai tenaga guru. Perlu koordinasi yang sungguh-sungguh dengan LPTK, seperti UPI, dan FKIP, maupun tunjangan khusus bagi guru-guru produktif yang mau mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh dalam dunia pendidikan," jelas Dadang.

Untuk itu, politisi asal dapil Jawa Barat itu mengingatkan agar lebih baik mengembangkan prodi dibanding menambah jumlah sekolah. Menurutnya, sektor unggulan SMK bidang kuliner, energi, pariwisata dan film perlu lebih dikembangkan.

Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Nuroji (F-Gerindra) ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjuna (F-PG), Dedi Wahidi (F-PKB), Sohibul Iman (F-PKS), dan Dony Ahmad Munir (F-PPP). ■



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sejumlah SMK di Jabar

"Kami berharap akan unggul di tingkat nasional. Semoga menjadi SMK pilihan dan dambaan masyarakat," kata Tatang.

Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih, mengatakan peran Pemerintah terhadap SMK perlu ditingkatkan. Dari sisi jumlah SMK juga perlu ditambah.

"Kami menyambut baik kebijakan Pemerintah untuk memfokuskan pada pendidikan vokasi. Untuk itu kami memberi beasiswa kepada murid SMK sebesar Rp1,5 juta per tahun setiap murid," jelas Elih.

Sementara dalam sesi dialog, beberapa Kepala Sekolah SMK dan guru SMK mengeluhkan minimnya jumlah guru produktif.

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjuna (F-PG), Dedi Wahidi (F-PKB), Sohibul Iman (F-PKS), Dony Ahmad Munir (F-PPP) dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). ■

(sf), Foto: Sofyan/mr

(sf), Foto: Sofyan/mr

# Demokrasi Tentukan Masa Depan Indonesia

DPR RI meyakini bahwa masa depan Indonesia terletak pada pondasi demokrasi yang dibangun negara saat ini. Masa depan Indonesia adalah demokrasi yang memberikan ruang partisipasi dan kesetaraan di masyarakat termasuk bagi kaum muda, perempuan, dan mereka yang berada di kelompok paling rentan. Demokrasi ikut menentukan masa depan Indonesia.

“ Tidak ada ruang bagi kepemimpinan bergaya otoriter. Demokrasi menjadi alat untuk membangun negara melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia hingga pemihakan kelompok-kelompok marginal.” Demikian disampaikan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat memperingati



Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI

Perayaan Hari Internasional Demokrasi yang jatuh pada Kamis (15/9) di DPR.

DPR, menurut Nurhayati tengah serius berbenah menjawab tantangan demokrasi dalam hal penguatan kelembagaan parlemen untuk membangun *check and balances* yang memadai, peningkatan dan pemberdayaan kaum muda untuk semakin melek politik, hingga mengawal Agenda 2030, sebuah agenda pembangunan global berkelanjutan (SDGs) yang bermuara pada peningkatan hajat hidup manusia secara keseluruhan.

"Demokrasi belum tentu bentuk terbaik dari sistem politik dan pemerintahan, tapi ia memberi garansi bagi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun sistem. Oleh karena itu, DPR RI sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia berkomitmen dalam mengupayakan inklusivitas demokrasi," jelas dia.

Tema Hari Internasional Demokrasi tahun ini bertajuk *Democracy and the Agenda 2030 for Sustainable Development*, menunjukkan betapa erat kaitannya antara

membangun iklim demokratis dengan pencapaian SDGs. DPR, lanjut Nurhayati, memiliki komitmen kuat untuk membangun demokrasi demi pencapaian SDGs. "Kami akan merawat masa depan demokrasi, meningkatkan peran pemuda dalam politik dan pembangunan serta memperkuat peran DPR untuk mengawal SDGs," tandasnya.

DPR terus berikhtiar membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan penegakan hukum yang berkeadilan dalam berbagai program dan agenda kerjanya. Dan program utamanya adalah peningkatan peran pemuda. DPR memiliki program Parlemen Remaja yang digelar setiap tahun untuk menstimulus kaum muda memahami suasana dan dinamika persidangan di parlemen.

Demokrasi tidak melulu menyangkut partisipasi perempuan dan kaum muda, tapi juga pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat. Dengan begitu, publik dapat secara kritis memilih panutan mereka dan menghindari sejauh mungkin *money politics*. Demokrasi dapat mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan keadilan sosial. Tujuan inilah yang hendak dicapai bangsa-bangsa di dunia dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Demokrasi, urai Nurhayati, adalah bagian dari *Sustainable Development Goals* yang diadopsi oleh 193 negara-negara anggota PBB pada September 2015 silam. SDGs-terutama *goals* ke-16-menyebut demokrasi yang mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga yang inklusif dan partisipatif. Dan DPR sudah membentuk Panja SDGs di bawah BKSAP untuk mendorong terwujudnya demokratisasi sesuai SDGs. Internasional untuk Demokrasi jatuh setiap tahun pada tanggal 15 September. Ia ditetapkan melalui Resolusi PBB (62/7) tahun 2007 tentang *Support by the UN system of the efforts of Governments to promote and consolidate new or restored democracies* yang mencatat hasil pertemuan *Advisory Board the 6th International Conference of New or Restored Democracies* dan juga masukan dari IPU yang telah mengadopsi *Universal Declaration on Democracy* pada September 1997. ■



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah bersama empat Menko

## Empat Menko Dituntut Jalin Koordinasi Secara Baik

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan kepada empat Kementerian Koordinator agar bersinergi dalam menjalankan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Penegasan tersebut ditujukan agar seluruh program pemerintah tepat sasaran.

**E**mpat Menko yang hadir dituntut agar menjalin koordinasi secara baik. Pernyataan tersebut disampaikan Said saat rapat Banggar dengan Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Bidang Kemaritiman, di ruang Sidang Banggar, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/9).

"Oleh karenanya kawan-kawan dari Banggar selalu mengingatkan bahwa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, jauh lebih penting agar seluruh program pemerintah tepat sasaran," tandasnya.

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur XI ini juga menilai, empat menko tersebut masih lemah dalam menjalankan fungsi koordinasi. "Ada berbagai catatan, kelemahan-kelemahan pada tingkat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, karena banyak di kementerian-kementerian operasional yang

sesungguhnya berbeda dengan pemerintah," ungkapnya.

Empat menko hadir dalam rapat ini, tidak ada yang diwakili. Menko Polhukam Wiranto, menyampaikan arah kebijakan bidang Polhukam tahun 2017, sebagaimana dipresentasikannya di hadapan Anggota Banggar, yakni kepastian dan penegakkan hukum, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi. Selain dua hal tersebut Wiranto juga masih menekankan pada stabilitas keamanan dan ketertiban serta reformasi birokrasi.

Sedangkan arah kebijakan perekonomian 2017, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjelaskan koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi makro yang kondusif masih menjadi perhatian. Untuk merealisasikan itu, strategi yang ditempuh dengan koordinasi kebijakan fiskal moneter, penguatan sistem keuangan, pengendalian utang luar negeri, dan pengendalian inflasi. ■

(6b) Foto: jayadi/mr

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
@dpr\_ri DPR RI @DPR\_RI DPR RI



RDP Komisi V DPR RI dengan sejumlah Dirjen Kementerian PUPR dipimpin Wakil Ketua Michael Wattimena, Kamis (15/9)  
Foto: andri

Tim Kunker Komisi X spesifik tentang pendidikan vokasi dipimpin Wakanya Abdul Fiqri Faqih meninjau praktik perhotelan siswa SMKN 6 Semarang dan laboratorium komputer teknik bangunan SMKN 7 Semarang / STM Pembangunan, Jumat(9/9),  
Foto : Ray



Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Elva Hartati meninjau fasilitas dan layanan kesehatan di Semen Padang Hospital, Senin (5/9). Foto: Husen